

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui pembentukan kapasitas individu. Douglass (2010) menjelaskan bahwa pendidikan tinggi berperan penting dalam pembentukan *human capital* serta memperluas peluang mobilitas sosial dan ekonomi, baik bagi individu maupun masyarakat. Melalui peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pribadi tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, seperti mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih inklusif serta memperluas kesempatan yang lebih setara dalam kehidupan sosial.

Di Indonesia, realisasi peran strategis pendidikan tinggi tersebut masih menunjukkan ketimpangan antardaerah. Pemerataan akses pendidikan tinggi masih menghadapi tantangan serius terutama bagi masyarakat yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Secara yuridis, pemerintah menetapkan status daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan daerah tertinggal 2020-2024, yang mendefinisikan daerah tertinggal sebagai kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain di tingkat nasional.

Penetapan daerah tertinggal tersebut didasarkan pada sejumlah kriteria, meliputi kondisi perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik wilayah. Dalam peraturan tersebut, wilayah Papua tercatat sebagai kawasan dengan jumlah kabupaten tertinggal paling banyak secara nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan pembangunan struktural yang kompleks dan berimplikasi langsung pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan tinggi. Akibatnya kesempatan generasi muda

di Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih relatif terbatas dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Kondisi ketertinggalan struktural tersebut tercermin pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di wilayah Papua. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Capaian APK Pendidikan tinggi di provinsi-provinsi Papua menunjukkan angka yang beragam sepanjang periode 2021-2025, dengan perbedaan yang cukup mencolok antarwilayah yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Menurut Provinsi di Wilayah Papua Sepanjang 2021-2025

Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
Papua Barat	35,80%	36,11%	33,89%	27,52%	27,99%	
Papua Barat Daya	-	-	-	36,71%	38,22%	Sebelum Pemekaran
Papua	20,04%	20,08%	19,99%	35,63%	34,08%	
Papua Selatan	-	-	-	25,07%	24,15%	Sebelum Pemekaran
Papua Tengah	-	-	-	15,45%	13,62%	Sebelum Pemekaran
Papua Pegunungan	-	-	-	12,23%	13,34%	Sebelum Pemekaran

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Perbedaan capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampak pemekaran wilayah yang mengubah struktur administrasi, komposisi demografis, serta distribusi layanan pendidikan tinggi, di mana sebagian provinsi baru sebelumnya masih tergabung dalam provinsi induk. Pemekaran tidak hanya berimplikasi pada keterbatasan kapasitas awal di sebagian wilayah, tetapi juga menimbulkan variasi capaian APK antar provinsi. Selain itu, provinsi dengan capaian APK yang relatif lebih tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh ukuran populasi usia kuliah yang lebih kecil, konsentrasi fasilitas pendidikan, serta mobilitas mahasiswa antar daerah. Oleh karena itu, capaian APK di wilayah Papua perlu dipahami secara kontekstual dan tidak semata-mata mencerminkan tingkat akses pendidikan secara langsung.

Secara keseluruhan, kondisi ini tetap mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi pendidikan tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Dari perspektif pemerataan kebijakan, ketimpangan capaian angka partisipasi kasar pendidikan tinggi antar provinsi di wilayah Papua menunjukkan bahwa instrument pemerataan pendidikan tinggi yang bersifat umum belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan khusus yang dirancang secara afirmatif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan struktural.

Berdasarkan kondisi tersebut, *affirmative action* dapat dipahami sebagai instrument korektif yang ditujukan untuk merespons ketidakadilan historis dan ketimpangan struktural yang dialami kelompok tertentu. Melalui tinjauan sistematis terhadap berbagai kebijakan afirmasi di pendidikan tinggi, Teshome (2024) menjelaskan bahwa *affirmative action* bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan akses dan representasi kelompok yang secara sistemik terpinggirkan melalui intervensi yang terarah, kontekstual dan berkeadilan. Dengan demikian, *affirmative action* tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan istimewa semata, melainkan untuk menciptakan titik awal yang lebih adil bagi kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi.

Sejalan dengan kerangka tersebut, di Indonesia kebijakan afirmatif di bidang pendidikan tinggi diwujudkan melalui Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Selanjutnya disebut Beasiswa ADiK) yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai bentuk dari strategi nasional dalam rangka pemerataan akses pendidikan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk Wilayah Papua yang secara struktural menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan Program Beasiswa ADiK dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya ketentuan yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin keterjangkauan dan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui dukungan pendanaan bagi kelompok masyarakat yang mengalami hambatan struktural. Secara operasional, program ini dijalankan oleh Kelompok Kerja Afiriasi Pendidikan di bawah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) atau yang sekarang dikenal dengan nama Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) . Melalui skema ini, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong terwujudnya keadilan pendidikan bagi mahasiswa asal wilayah 3T, termasuk Wilayah Papua.

Pada tataran implementasi kebijakan afirmatif di bidang pendidikan tinggi, pelaksanaannya menghadapi tantangan yang berbeda-beda pada setiap perguruan tinggi. Perbedaan kapasitas institusional, kesiapan sumber daya serta karakteristik mahasiswa penerima program memengaruhi bagaimana kebijakan afirmatif dirasakan dan dijalankan dalam praktik akademik sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan di tingkat pusat, melainkan juga oleh kemampuan perguruan tinggi dalam menyediakan dukungan akademik, sosial dan administratif yang kontekstual bagi mahasiswa sasaran

Perluasan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan afirmatif melalui program beasiswa ADiK telah membuka kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari daerah 3T, terbukanya akses pendidikan tinggi tersebut tidak secara otomatis menjamin keberhasilan studi mahasiswa penerima program. Lewin (2015) menegaskan bahwa akses pendidikan yang bersifat universal perlu diiringi dengan jaminan bahwa mahasiswa tidak hanya terdaftar, tetapi juga benar-benar menjalani proses pembelajaran dan memperoleh hasil belajar yang bermakna. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan afiriasi tidak dapat diukur semata-mata dari peningkatan angka partisipasi melainkan juga dari

kualitas proses pembelajaran serta keberlanjutan studi mahasiswa penerima program.

Pada tingkat institusional, implementasi kebijakan afirmatif di bidang pendidikan tinggi turut melibatkan perguruan tinggi sebagai pelaksana utama program. Universitas Andalas merupakan salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa asal Papua. Berdasarkan data Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas tahun 2025, sejak program afirmasi mulai dilaksanakan pada tahun 2012 hingga tahun 2025, Universitas Andalas telah menerima mahasiswa asal Papua melalui skema Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi yang tersebar pada berbagai fakultas dan program studi. Data tersebut menunjukkan komitmen Universitas Andalas dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah Papua. Adapun sebaran jumlah mahasiswa asal Papua penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi di Universitas Andalas selama periode 2012–2025 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :



Tabel 1.2 Total Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi di Universitas Andalas dari Tahun 2012 – 2025

No	Fakultas	Jumlah mahasiswa														Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kedokteran	-	3	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	-	-	11
2	Kedokteran Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Pertanian	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	1	8
4	Hukum	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
5	Farmasi	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	1	2	-	-	9
6	Teknologi Pertanian	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
7	Keperawatan	-	-	1	1	-	3	1	-	-	1	-	2	-	-	9
8	Ekonomi dan Bisnis	-	1	2	1	2	1	-	2	-	-	1	2	-	-	12
9	Peternakan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	MIPA	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4
11	Ilmu Budaya	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
12	ISIP	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	5
13	Kesehatan Masyarakat	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	9
14	Teknologi Informasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Teknik	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Total		2	10	9	6	11	9	3	2	2	4	6	13	9	4	86

Sumber : Direktorat Kemahasiswaan UNAND, 2025

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa penerima beasiswa ADiK dari Wilayah Papua di Universitas Andalas masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat keterwakilan mahasiswa asal papua dalam komposisi mahasiswa Universitas Andalas, serta menandakan adanya tantangan dalam upaya pemerataan akses pendidikan tinggi sekaligus pengembangan sumber daya manusia dari wilayah tertinggal. Padahal, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas individu agar mampu berkontribusi secara optimal dalam kehidupan sosial dan professional. Perguruan tinggi berperan penting dalam proses tersebut melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga adaptif dalam menghadapi tuntutan dunia kerja dan dinamika ekonomi global (Abdillah, 2024).

Sebagai bagian dari kebijakan pemerataan akses pendidikan tinggi, Beasiswa ADIK tidak hanya dipahami sebagai penyediaan pembiayaan kuliah dan biaya hidup, tetapi juga sebagai bentuk *affirmative action* untuk menjembatani ketimpangan struktural dan mendukung keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia bagi putra - putri wilayah Papua dan daerah tertinggal lainnya. Namun berbagai kajian menunjukkan terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan afirmatif dan realitas implementasinya di tingkat perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhil & Sabic-El-Rayess (2021) menyoroti adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia dan praktik implementasinya di lapangan. Mereka menunjukkan bahwa keterbatasan mekanisme implementasi, kapasitas institusional, dan dukungan kebijakan di tingkat perguruan tinggi berpotensi menghambat efektivitas kebijakan afirmatif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Kondisi tersebut juga tercermin pada implementasi Beasiswa ADiK di Universitas Andalas. Pada tahun 2022 melalui surat keputusan Rektor mengenai penetapan penerima lanjutan afirmasi pendidikan tinggi ADiK menunjukkan bahwa terdapat 15 mahasiswa telah menempuh studi lebih dari delapan semester dari Angkatan 2013 sampai dengan 2018. Sementara itu, pada angkatan 2019, 2020 dan 2021 keseluruhan penerima juga mengalami keterlambatan studi, beberapa di antaranya bahkan belum menyelesaikan studi hingga saat ini.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan afirmatif masih perlu diimbangi dengan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi hingga tahap kelulusan. Kondisi ini mengindikasikan adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan keberhasilan studi mahasiswa penerima ADiK selama menempuh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya penting dilihat dari meningkatnya kesempatan akses pendidikan tinggi bagi anak Papua tetapi juga dari kemampuan perguruan tinggi dalam memberikan dukungan yang memadai guna menunjang kelancaran studi dan penyelesaian pendidikan secara tepat waktu.

Dalam implementasi kebijakan afirmatif di pendidikan tinggi, pemberian akses melalui beasiswa dan jalur khusus merupakan langkah awal untuk memperluas kesempatan belajar bagi kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Namun, keberhasilan mahasiswa penerima afirmasi tidak hanya ditentukan oleh kesempatan masuk ke perguruan tinggi, melainkan juga oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik dan menyelesaikan studi secara berhasil. Bagi mahasiswa asal Papua penerima beasiswa ADiK, proses adaptasi tersebut sering kali berlangsung dalam konteks perbedaan latar belakang sosial, budaya, geografis, dan pengalaman pendidikan dengan lingkungan perguruan tinggi yang mereka masuki.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada mahasiswa asal Papua penerima beasiswa afirmasi ADiK untuk memahami bagaimana mereka memaknai dan mengalami dukungan akademik selama menempuh pendidikan tinggi. Fokus ini penting karena keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh terbukanya akses pendidikan, tetapi juga oleh tersedianya sistem dukungan yang mampu membantu mahasiswa beradaptasi, mengembangkan potensi akademiknya, dan menyelesaikan studi secara optimal.

Sebagai upaya memahami praktik implementasi kebijakan afirmatif dalam konteks perguruan tinggi, peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa ADiK asal Papua yang menempuh studi di fakultas non eksakta sebagai bentuk observasi awal. Observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi awal mengenai bagaimana kebijakan afirmatif dijalankan dalam praktik akademik serta bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh mahasiswa penerima program.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa ADiK, menunjukkan bahwa mahasiswa penerima beasiswa ADiK mengatakan program ini sangat membantu dalam membuka akses pendidikan tinggi, khususnya karena pembiayaan pendidikan dan biaya hidup ditanggung oleh pemerintah. Indikasi awal ini menunjukkan dalam tahap akses kebijakan afirmatif melalui beasiswa ADiK telah berjalan sesuai tujuan kebijakan yaitu mengurangi hambatan struktural dan memperluas pemerataan kesempatan mengakses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang berasal dari wilayah tertinggal.

Namun demikian, dari wawancara tersebut juga muncul beberapa kendala dalam pelaksanaan program yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan studi. Informan menyampaikan adanya keterlambatan pencairan dana beasiswa pada tahap awal keberangkatan sehingga mahasiswa perlu menanggung sementara kebutuhan akademik dan non akademik. Kondisi ini diduga memengaruhi pada proses adaptasi akademik mahasiswa pada masa awal perkuliahan. Indikasi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Goldrick Rab *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan dukungan finansial, meskipun bersifat sementara, dapat meningkatkan kerentanan mahasiswa dari kelompok kurang mampu dalam mempertahankan keberlanjutan studi.

Selain aspek finansial, observasi awal juga mengindikasikan adanya keterbatasan dukungan institusional di tingkat perguruan tinggi. Informan menyebutkan bahwa belum tersedianya fasilitas asrama secara memadai menyebabkan sebagian dana beasiswa dialokasikan untuk kebutuhan tempat tinggal, sehingga berpotensi membatasi pemenuhan kebutuhan akademik lainnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bantuan finansial memang berperan dalam memperluas akses pendidikan tinggi, namun keberlanjutan studi turut dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan akademik dan sosial di lingkungan perguruan tinggi (Wanti *et al.*, 2022).

Lebih lanjut, berdasarkan pengalaman informan, pendampingan akademik dan sosial di tingkat fakultas belum sepenuhnya terstruktur untuk membantu proses adaptasi terhadap tuntutan pembelajaran. Pengalaman ini mengindikasikan bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa penerima Beasiswa ADiK tidak hanya berkaitan dengan faktor individual, tetapi juga dapat berhubungan dengan bagaimana kebijakan afirmatif diterjemahkan dalam praktik akademik sehari-hari. Indikasi awal ini masih memerlukan penelusuran lebih lanjut guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi program.

Sejumlah penelitian mengenai affirmative action di pendidikan tinggi hingga saat ini cenderung menempatkan perhatian utama pada dampak kebijakan dan capaian akhir mahasiswa, seperti perubahan pola akses, pilihan bidang studi dan implikasinya terhadap mobilitas sosial. Penelitian oleh Estevan *et al.* (2025) misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif dapat memperluas peluang mahasiswa dari latar belakang kurang beruntung untuk mengakses program studi yang bergengsi dan prospek hasil yang lebih tinggi. Namun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada aspek hasil kebijakan, sementara pembahasan mengenai bagaimana kebijakan afirmatif dijalankan di tingkat perguruan tinggi belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Efektivitas kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan capaian akhirnya, tetapi juga oleh proses implementasi serta kondisi pendukung di lingkungan perguruan tinggi. Studi Peng & Ye (2025) menekankan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan informasi, pengaruh teman sebaya dan dukungan akademik informal berperan dalam menentukan sejauh mana mahasiswa penerima kebijakan afirmatif mampu memanfaatkan program tersebut secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif dipengaruhi oleh mekanisme implementasi dan konteks institusional. Namun, penelitian yang menelaah implementasi kebijakan afirmatif di tingkat perguruan tinggi, khususnya Indonesia, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk melengkapi kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada capaian hasil kebijakan

Berdasarkan temuan dan celah penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada implementasi *affirmative action* melalui program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) di Universitas Andalas. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut didukung oleh aspek konteks, kesiapan input serta dinamika proses pelaksanaan program. Dengan menempatkan implementasi sebagai titik utama, penelitian ini diharapkan tidak hanya meninjau capaian kebijakan tetapi juga mengkaji proses dan kondisi yang memengaruhi keberlanjutan studi mahasiswa penerima program.

Sehingga, untuk menjawab fokus tersebut, penelitian ini akan menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Leroy Stufflebeam meliputi *Context*, *Input*, *Procces* dan *Product* sebagai kerangka analisis. Model CIPP dipandang relevan karena memungkinkan evaluasi program dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menilai capaian akhir tetapi juga menelaah kesiapan konteks, kecukupan input serta dinamika proses pelaksanaan program di universitas. Penelitian yang dilakukan Alanshori *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa model CIPP merupakan kerangka evaluasi yang fleksibel dan banyak digunakan dalam evaluasi program pendidikan di Indonesia karena dianggap mampu dalam mengintegrasikan analisis *Context*, *Input*, *Procces* dan *Product* secara sistematis.

Universitas Andalas sebagai salah satu perguruan tinggi penerima mahasiswa afirmasi sedari tahun 2012 memiliki karakter institusional dan lingkungan akademik yang khas. Karakteristik ini berpotensi mempengaruhi dinamika implementasi kebijakan afirmatif baik dari aspek administratif, akademik maupun dukungan institusional yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana evaluasi implelementasi *affirmative action* melalui program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dijalankan di Universitas Andalas. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena ini dengan mengangkat judul “Evaluasi Implementasi *Affirmative Action* Melalui Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Bagi Mahasiswa Asal Papua Di Universitas Andalas”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konteks pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas, berdasarkan kajian literatur dan dokumen kebijakan?
2. Bagaimana kecukupan input dalam pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas?
3. Bagaimana proses pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas?
4. Bagaimana hasil (*product*) pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan solusi dari permasalahan yang disebutkan sebelumnya, antara lain :

1. Untuk mengetahui konteks pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas, berdasarkan kajian literatur dan dokumen kebijakan.
2. Untuk mengetahui kecukupan input dalam pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas.
4. Untuk mengetahui bagaimana hasil (*product*) pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa asal Papua di Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca mengenai evaluasi implementasi Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) sebagai bentuk kebijakan *affirmative action* di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi Program Beasiswa ADiK berdasarkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product), sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji evaluasi program pendidikan maupun implementasi kebijakan *affirmative action* di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ADiK. Bagi Universitas Andalas. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal untuk memperbaiki tata kelola serta sistem monitoring dan evaluasi program ADiK agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa asal Papua. Bagi pengelola program dan pemangku kebijakan pendidikan tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbaikan desain program afirmatif di masa mendatang. Selain itu, bagi mahasiswa penerima program ADiK, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan akademik yang lebih mendukung, inklusif dan berkeadilan dalam menunjang keberlanjutan studi mereka.